



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LOGO KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 119/PMK.05/2007
TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF
DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : <Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengusulkan untuk menerapkan PK BLU>
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 E-mail : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa <Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengusulkan untuk menerapkan PK BLU> sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat;

melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

....., 20.....

< Pimpinan Satker ybs >

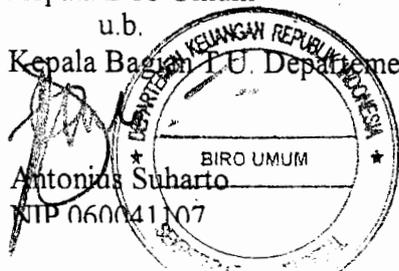
Menyetujui,
Menteri/Pimpinan lembaga

Materai
Rp. 6.000,-
Tanggal dan
Cap Instansi

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

LOGO KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERNYATAAN
 BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk : <Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengusulkan untuk
 dan atas nama : menerapkan PK BLU >
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 E-mail : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, <Satuan Kerja Instansi Pemerintah> bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

...../...../..... 20....

< Pimpinan Satker ybs >

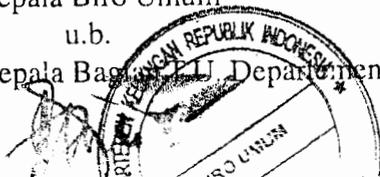
Menyetujui,
 Menteri/Pimpinan lembaga



Tanda Tangan
 <Nama Jelas>

Tanda Tangan
 <Nama Jelas>

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian P.L.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 119/PMK.05/2007
TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF
DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

LOGO KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENGAJUAN USULAN PENETAPAN
SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Menteri Keuangan RI
Perihal	:	Permohonan Penetapan <Satker Instansi Pemerintah> Untuk Menerapkan PK BLU	u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini kami mengusulkan agar <Satker Instansi Pemerintah> dapat ditetapkan sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

Sesuai hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa <Satker Instansi Pemerintah>:

- telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis sebagaimana diatur dalam PP dimaksud;
- memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PK BLU;
- mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut:

- Nama Satker Instansi :
Pemerintah
- Alamat Lengkap : _____

- Telp : _____ Fax : _____

- Lampiran-lampiran:
 - Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
 - Pola Tata Kelola
 - Rencana strategis bisnis
 - Laporan Keuangan Pokok
 - Standar Pelayanan Minimal
 - Laporan audit tahun <tahun terakhir> / Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen *)

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri/ Pimpinan Lembaga

*) coret yang tidak perlu

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Departemen

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRIMULYANI INDRAWATI